

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2023, 11 (1) : 51-60
ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
©Copyright 2023

**STRATEGI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIA ONGKOS ANGKUT (POA)
JALUR SUNGAI DI KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Leri Christian Ananda Putra Lawing, Iman Surya, Anwar Alaydrus

**eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 11 ,
Nomor 1, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Strategi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Program Penyedia Ongkos Angkut (POA) Jalur Sungai di Kabupaten Mahakam Ulu
Pengarang : Leri Christian Ananda Putra Lawing
NIM : 1502025139
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

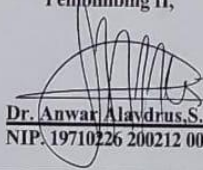
Samarinda, 1 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Iman Surya, S.Sos, M.Si
NIP. 19741212 200112 1 001

Pembimbing II,



Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM
NIP. 19710226 200212 002

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Ilmu Pemerintahan
Volume :
Nomor :
Tahun : 2023
Halaman :

STRATEGI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN ONGKOS ANGKUT (POA) JALUR SUNGAI DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

Leri Christian Ananda Putra Luwing¹, Iman Surya², Anwar Alaydrus³

Abstrak

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang digunakan Dinas Perhubungan Mahakam Ulu dalam pelaksanaan Program Penyedia Ongkos Angkut Jalur Sungai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu pelaku pengawasan pelaksana kebijakan, standar operasional, sumber daya keuangan dan peralatan, jadwal pelaksanaan pengawasan serta faktor penghambat pelaksanaan program Penyedia Ongkos Angkut (POA) jalur sungai di Mahakam Ulu. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu, Kepala Bidang Darat dan Sungai, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyedia Ongkos Angkut (POA) Mahakam Ulu, Petugas Lapangan. Informannya ialah masyarakat yang menggunakan transportasi jalur sungai di Mahakam Ulu. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Temuan didalam penelitian ini ialah strategi Pemerintah dalam pengawasan program Penyedia Ongkos Angkut (POA) jalur sungai di Mahakam Ulu belum berjalan dengan baik, dilihat dari SOP yang berlaku masih banyak kecurangan yang dilakukan. Dinas perhubungan belum maksimal dalam hal pemeriksaan manifes penumpang, sehingga subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: Strategi, Pengawasan, Program Penyedia Ongkos Angkut (POA)

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lerichristian10@gmail.com

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, transportasi merupakan faktor krusial yang menggerakkan segala sesuatunya. Bagaimana transportasi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kita Sumber daya alam yang sebelumnya kurang dimanfaatkan sekarang akan tersedia karena kemampuan transportasi untuk menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas dan potensi sumber daya alam dan ukuran pasar.

Menurut UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008, kapal pesiar merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi kepelabuhanan, pengaturan lalu lintas, keamanan, dan penegakan hukum maritim. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab selain untuk menyediakan jenis-jenis alat transportasi, pemerintah juga harus mampu memenuhi jumlah alat transportasi dan segala aspek prasyarat kelayakan alat transportasi tersebut agar bisa di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pendanaan pemerintah untuk program Penyedia Biaya Transportasi (POA) merupakan salah satu bentuk pertumbuhan yang perlu diperhatikan. Dukungan dana dari pemerintah daerah yang diberikan kepada penyalur sembako masyarakat dari pusat distribusi hingga tingkat kecamatan pedalaman, menjadikan program ini sebagai pilar upaya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk membantu masyarakat setempat. Sementara itu, biaya pengangkutan kebutuhan hidup bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman dan di sepanjang perbatasan tercermin dalam tarif angkutan yang khas untuk kegiatan tersebut. Tujuan dari program ini adalah untuk memudahkan masyarakat berpindah tempat dan mendistribusikan kebutuhan pokok secara adil di antara masyarakat perbatasan dengan tetap menjaga kestabilan biaya hidup.

Latar belakang dari program Penyedia Ongkos Angkut (POA) adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk bepergian dan harga kebutuhan pokok yang juga sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dengan medan yang sulit untuk dilewati serta cuaca yang berubah-ubah dan tidak teratur, banjir aliran sungai atau mengalami musim kemarau panjang, menghambat mobilisasi orang dan barang, serta kurangnya akses transportasi darat yang memadai menjadi kendala yang membuat biaya transportasi menjadi sangat tinggi.

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten terbaru di Provinsi Kalimantan Timur. Sidang paripurna DPR RI mengesahkan RUU Daerah Otonom Baru pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu pada 14 Desember 2012, menyusul pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat (DOB). Dengan luas wilayah

15.315,00 km², Kabupaten Mahakam Ulu terbagi menjadi lima kecamatan yaitu Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari. Pada tahun 2020, populasi diproyeksikan menjadi 35.010, dan akan ada 50 permukiman.

Program POA merupakan kelanjutan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang pelaksanaan sejak tahun 2017, namun pada tahun 2022 SOA berubah menjadi POA (penyedia ongkos angkut) dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui dana APBD pada pos Belanja Langsung Dinas sampai saat ini. Berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemberian Tarif Angkutan Bagi Penumpang Angkutan Sungai Yang Tidak Mampu, Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab atas pelaksanaan program POA di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pengguna penyedia jasa angkutan speedboat (POA) sering menghadapi kendala seperti kartu yang diterbitkan untuk penumpang bersubsidi masih belum tepat sasaran, pemilik armada sering menyetorkan penumpang, armada speedboat belum siap pada jadwal pemberangkatan, dan mahal biaya transportasi. ongkos yang dikeluarkan saat bepergian. Preferensi tarif penumpang akan bertentangan dengan pengaturan tarif berbasis pengguna saat ini karena tidak adanya standar layanan yang tinggi dari penyedia layanan transportasi sungai.

Para penulis, dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, menyatakan masalah tersebut sebagai berikut.:

1. Bagaimana rencana Dinas Perhubungan untuk memantau Program Penyedia Tarif Angkutan Jalur Sungai yang baru di Kabupaten Mahakam Ulu?
2. Apakah ada yang menghambat Program Penyediaan Tarif Angkutan Jalur Sungai untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan Mahakam Ulu?

Teori dan Konsep

Strategi

Strategi, sebagaimana didefinisikan oleh Argyris dalam Rangkuty (2001), adalah reaksi organisasi yang berkelanjutan dan fleksibel terhadap peluang dan ancaman dari luar, serta kekuatan dan kelemahan dari dalam.

Sementara itu, strategi didefinisikan oleh Marrus (2002: 31) sebagai prosedur dimana pimpinan puncak mengembangkan rencana untuk tujuan jangka panjang organisasi dan persiapan metode atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, seperti dikemukakan Porter dalam Rangkuty (2002:3), strategi sangat penting untuk berhasil di pasar.

Menurut Tjiptono (2006:3) “Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu Strategi yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal.” Strategi juga

bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa strategi adalah usaha atau rencana-rencana berupa tindakan yang dibuat serta dilakukan oleh para pemimpin, seseorang atau sekelompok orang karena melihat potensi kedepannya dengan maksud mencapai suatu tujuan.

Pengawasan

Menurut Fachruddin (2006:216) kata “Pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “Penjagaan”. Istilah “Pengawasan” dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

Menurut Basuki (2007) “pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga, badan, unit yang mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, monitoring, perbaikan dan evaluasi.”. Reksohadiprodjo (2008) berpendapat bahwa supervisi adalah upaya mengarahkan pelaksana menuju hasil yang konsisten dan telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Manullang (2012:173) menyatakan “pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Jadi dapat dipahami bahwa pengawasan itu merupakan suatu proses mengamati dan menilai secara keseluruhan terkait pelaksanaan kegiatan untuk melihat kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin didapat.

Sistem Pengawasan

Beberapa ciri supervisi yang efektif adalah sebagai berikut, seperti dikemukakan oleh Duncan dalam Harahap (2002:46):

- a. Tujuan dan fungsi pengawasan perlu dipahami.
- b. Model organisasi untuk pengawasan harus digunakan.
- c. Kemampuan untuk menemukan masalah dalam suatu organisasi sangat penting untuk pengawasan.
- d. Pengawasan harus adaptif.
- e. Efisiensi ekonomi dalam pengawasan sangat penting.

Prinsip Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip, hal ini dikarenakan prinsip pengawasan merupakan pedoman yang harus dipatuhi dan sangat berkaitan dengan yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi. Handyaningrat mengemukakan bahwa:

1. Pengawasan yang berorientasi pada tujuan adalah norma dalam bisnis modern.

2. Kontrol harus adil, terus terang, dan demi kepentingan terbaik publik.
3. Sesuai aturan, pengawasan harus mengutamakan ketelitian.
4. Hukum yang relevan, diarahkan pada keakuratan tujuan pekerjaan, harus diikuti.
5. Pengawasan bertanggung jawab untuk memastikan pasokan yang memadai dan alur kerja yang efektif.
6. Standar pengawasan harus tidak memihak, lengkap, dan spesifik
7. Pengawasan harus bersifat terus menerus
8. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap
9. Perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Program Penyedia Ongkos Angkut

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu melalui pelaku usaha Transportasi (Speed Boat) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 13 Tahun 2018.

Subsidi diberikan agar individu dan keluarga berpenghasilan rendah dapat meningkatkan pengeluaran mereka dan tetap berada di masyarakat, di mana mereka dapat memperoleh manfaat dari layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan sosial.

Subsidi adalah jenis bantuan keuangan atau kontribusi moneter yang dapat datang dalam berbagai format, yaitu:

1. Transfer moneter langsung, seperti dari hibah, pinjaman, partisipasi, transfer moneter langsung, atau jaminan atau utang langsung.
2. Pengurangan penerimaan pajak atau pengecualian fiskal lainnya.
3. Menyediakan atau memperoleh barang dan jasa di luar infrastruktur yang didukung public
4. Untuk menyediakan dana, pemerintah baik secara langsung membayar mekanisme pendanaan atau memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
5. Jika bantuan tersebut menghasilkan keuntungan, maka itu adalah subsidi, seperti semua bentuk dukungan pendapatan dan harga lainnya.

Definisi Konsepsional

Sebagaimana dimaknai oleh penelitian ini, “Strategi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Program Penyediaan Tarif Angkutan Alur Sungai (POA) Kabupaten Mahakam Ulu” mengacu pada proses pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan. . Pemerintah melakukan jenis pengawasan ini untuk melindungi negara dari konsekuensi potensial dari salah urus moneter.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Untuk melaksanakan Program Penyedia Tarif Angkutan Alur Sungai (POA) di Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas Perhubungan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Agen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan
 - b. Manual Prosedur Operasi (SOP)
 - c. Dana dan Alat yang Tersedia
 - d. Jadwal Pengenalan Pengawasan
2. Tantangan strategi pengawasan transportasi yang komprehensif untuk Program Penyedia Ongkos Angkutan Rute Sungai (POA) di Kabupaten Mahakam Ulu.

Baik data primer maupun data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu, Kepala Bidang Hubungan Darat dan Sungai, Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan Penyedia Tarif Angkutan Mahakam Ulu (POA), dan Petugas Lapangan merupakan pilihan yang sangat baik untuk sumber primer informasi. Data sekunder yang digunakan dalam penyelidikan ini berasal dari berbagai sumber seperti materi yang diterbitkan dan catatan pemerintah. Sehubungan dengan Rencana Dinas Perhubungan Menggulirkan Program Penyedia Ongkos Angkutan Rute Sungai (POA) di Kabupaten Mahakam Ulu

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini meliputi (1) penelitian kepustakaan dan (2) penelitian yang dilakukan di lapangan, meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Menurut Miles dan Huberman, Sugiyono (2013: 247), peneliti menggunakan pendekatan analisis data deskriptif kualitatif, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Empat tahapan analisis data adalah sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data (2) Reduksi Data (3) Penyajian Data (4) Penarikan Kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Program Penyedia Ongkos Angkut (POA) Jalur Sungai di Kabupaten Mahakam Ulu

a. Pelaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Menurut temuan, yang bertanggung jawab mengawasi implementasi kebijakan adalah mereka yang bertugas melaksanakannya; supervisi didefinisikan sebagai “proses mengukur kinerja dan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Karena tidak ada kebijakan yang dapat dibiarkan sendiri tanpa semacam pengawasan, seseorang harus selalu memeriksa seberapa baik itu bekerja untuk memecahkan masalah dan memberikan hasil yang diinginkan.

Keberhasilan suatu pengawasan tergantung pada sejumlah faktor, antara lain prosedur pengawasan yang efektif dan kapasitas pelaku pengawasan untuk melaksanakan setiap kegiatan pengawasan.

Dengan demikian bahwa pelaku pengawasan pelaksanaan kebijakan sudah melakukan pengawasan dengan baik dibuktikan dengan adanya pengawasan terhadap program subsidi angkutan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu di kawasan perbatasan.

b. *Standar Operasional Prosedur Pengawasan*

Kajian ini menemukan bahwa keberadaan pedoman sebagai acuan SOP untuk menilai tingkat implementasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan upaya pengawasan. Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan terukur dari kegiatan yang direncanakan sebagai bagian dari prosedur operasi standarnya untuk mengendalikan implementasi kebijakan.

Tindakan korelatif dapat terdiri dari upaya untuk mencapai kinerja yang digariskan dalam rencana atau memodifikasi rencana agar lebih dekat dengan (mencerminkan) kinerja, dan pengawasan harus dilakukan untuk mengukur kinerja individu, program, dan sistem secara keseluruhan..

Dengan demikian bahwa dalam Standar Operasional Prosedur Pengawasan belum berjalan dengan baik, Dinas Perhubungan belum melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir kecurangan dalam pemberian subsidi dengan tujuan agar subsidi tepat sasaran dan memudahkan pendataan penumpang jika terjadi situasi gawat darurat.

c. *Sumber Daya Keuangan dan Peralatan*

Menurut temuan, anggaran dan kelengkapan infrastruktur merupakan penunjang dalam proses pengawasan, dan hal ini berlaku terlepas dari ada atau tidaknya indikator aktor pengendalian dan prosedur operasi standar (SOP) pengawasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Harus ada cukup uang dan peralatan yang tepat bagi seseorang untuk melakukan kontrol atas implementasi kebijakan, dengan kedua faktor tersebut sangat bergantung pada berbagai persyaratan proses untuk melakukannya.

Dengan demikian bahwa mengenai sumber daya keuangan dan peralatan sudah dikatakan baik. Dimana Pemerintahan adalah pihak yang bertanggung jawab atas terelisasinya kegiatan baik dalam bentuk pengawasan, penindakan.

d. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Menurut temuan penelitian, penerapan kontrol bulanan atau triwulanan layak dilakukan untuk pengendalian internal, tetapi menetapkan jadwal untuk pengendalian eksternal lebih menantang karena pengendalian tersebut ada di luar organisasi dan karena itu tidak berada di bawah lingkup agen pengendali dalam organisasi.

Mengontrol tindakan mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan yang ditetapkan sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi berfungsi sesuai dengan misi yang dinyatakan.

Sejauh ini, semuanya telah berjalan sesuai rencana dalam hal mewujudkan rencana. Departemen Perhubungan selalu bertugas membuat rencana, memastikan keselamatan, dan mengawasi segala sesuatunya.

2. Faktor Penghambat Strategi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Program Penyedia Ongkos Angkut (POA) Jalur Sungai di Kabupaten Mahakam Ulu

Kajian yang dilakukan selama ini mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang menghambat efektivitas proses pengawasan pada program Penyedia Tarif Angkutan Rute Sungai (POA) di Mahakam Ulu terkait dengan standar operasional prosedur (SOP) yang mengakibatkan seringnya waktu keberangkatan tertunda, dikarenakan armada yang harusnya berangkat tidak siap, adapun yang menjadi penyebabnya yaitu karena bahan bakar yang kadang tidak ada atau karena pengemudi armada yang tidak bisa mengemudikan armada pada saat jadwal seharusnya tersebut, jadi pada akhirnya keberangkatan harus ditunda dan calon penumpang menumpuk.

Penutup
Kesimpulan

Kajian ini akan memaparkan temuan-temuan terkait strategi pengawasan Departemen Perhubungan (DOT) dalam implementasi program penyedia biaya angkutan (POA) trayek sungai di Mahakam Ulu, sebagai berikut:

1. Dari sisi pengawas, sumber dana dan peralatan serta jadwal pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik, sehingga strategi pengawasan Dinas

Perhubungan terhadap Program Penyedia Tarif Angkutan Jalur Sungai (POA) di Kabupaten Mahakam Ulu secara umum sudah terlaksana dengan baik. Namun dari standar operasional prosedur pengawasan masih mengalami hambatan.

2. Strategi Departemen Perhubungan (DOT) untuk memantau peluncuran program Penyedia Tarif Angkutan (POA) Kabupaten Mahakam Ulu mengalami kendala karena jadwal kapal yang memaksa armada MT harus melaut padahal belum siap. Dengan berbagai kendala diantaranya yaitu bahan bakar yang kadang tidak ada, akhirnya keberangkatan harus ditunda dan calon penumpang menjadi menumpuk.

SARAN

Penulis menyarankan beberapa perubahan terhadap strategi Dinas Perhubungan dalam pemantauan program Penyedia Tarif Angkutan Alur Sungai (POA) di Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas:

1. Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Perhubungan perlu membangun kembali jalur komunikasi yang terbuka dengan semua pihak terkait transportasi dan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Selain itu, Pemkab perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pengemudi Speedboat tentang program Penyedia Ongkos Angkutan (POA).
2. Dinas perhubungan seharusnya melakukan koordinasi kembali bersama dengan pihak yang terkait dalam hal menentukan standar yang jelas untuk mengkategorikan Masyarakat tidak mampu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan yang sebelumnya sudah terjadi agar tidak terulang kembali di kemudian hari, dan juga agar dapat menunjang pelaksanaan pengawasan terkait program penyedia ongkos angkut (POA) kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan publik*. Yogyakarta,
- Hasibuan, Malayu S. P. 2005. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan* , PT. RINEKA CIPTA: Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta: Bandung PT. Hanindita.

- M. Manullang, 2012. *Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta. Gajah Mada Press.
- N. Fachruddin, Irfan. 2006. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.
- O. Assauri, Sofjan. 2011. *“Strategic Management, Sustainable Competitive Advantage”*. Indonesia, Jakarta
- Teori Teknik Pengawasan Pada Buku yang diterbitkan Sarwoto pada tahun 2001.
- Winardi. 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purnomo, Setiawan Hari. 1996. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Afifuddin 2012, *Pengantar administrasi pembangunan*, Bandung: Alfabeta
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan*, Graha ilmu:yogyakarta.
- Husein Umar, 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet ke 6, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Dokumen-dokumen***
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.
- Peraturan Bupati Mahakam Ulu no 1 Tahun 2017 Tentang Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai.
- Peraturan Bupati Mahakam Ulu no 13 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Biaya Angkut Bagi Penumpang Transportasi Sungai Yang Tidak Mampu.